BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

2.1.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dalam perekonomian Indonesia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai goncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan pungutan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah di atur dalam hukum berdasarkan Undang-Undang.

Menurut Undang-Undang No.20 tahun 2008 yang di maksud dengan usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

- Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah

atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2.1.2 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 yang menjadi kriteria usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Kriteria sebagaimana dimaksud di atas, nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

2.2 Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Kas

Menurut **Mardi (2011:3)** Sistem berasal dari bahasa Latin (*systema)* dan bahasa Yunani (*sustema),* artinya suatu kesatuan komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana sering kali menggunakan suatu model matematika.

Menurut **Mulyadi (2013:3)** Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut **Zaki Baridwan (2010:182**) Sistem adalah suatu kerangka dan prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang di susun dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan.

Menurut **Mardi (2011:59)** Pengendalian internal merupakan suatu sistem yang meliputi struktur organisasi beserta semua mekanisme dan ukuran-ukuran yang dipatuhi bersama untuk menjaga seluruh harta kekayaan organisasi dari berbagai arah.

Menurut ***American Institute of Certified Public Accountant (AICPA)*** yang di kutip oleh **Mardi (2011:59)** pengendalian internal mencakup rencana organisasi dan semua metode serta tindakan yang telah digunakan dalam perusahaan untuk mengamankan aktivitasnya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, memajukan efisiensi operasi dan mendorong ketaatan pada kebijakan yang telah ditetapkan.

Menurut **Zaki Baridwan (2013:47)** pengendalian internal meliputi organisasi dari semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan,memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam usaha dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu.

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah struktur organisasi yang dijalankan dengan tujuan mengamankan seluruh harta kekayaan organisasi, mengecek keandalan data akuntansi, memajukan efisiensi dan mendorong ketaatan pada kebijakan yang telah ditetapkan.

2.2.1 Pengertian Kas

Menurut **Harahap (2010:258)** Kas adalah uang dan surat berharga lainnya yang dapat diuangkan setiap saat serta surat berharga lainnya yang sangat lancar yang memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Setiap saat dapat ditukar menjadi kas.
2. Tanggal jatuh tempo sangat dekat.

Kecil resiko perubahan nilai yang disebabkan perubahan tingkat harga.

Menurut **Raja Adri Satriawan Surya (2012:66)** Kas *(cash)* adalah media pertukaran standar serta merupakan dasar akuntansi dan pengukuran untuk semua pos-pos lainnya.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kas adalah harta lancar yang digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi keuangan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan sistem pengendalian internal penerimaan kas adalah suatu rangkaian yang meliputi struktur organisasi dan bertujuan untuk menjaga penerimaan kas perusahaan.

2.2.2 Proses Pengendalian Internal

Proses pengendalian internal sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam perusahaan.

Menurut **Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:107)**

Pengertian Proses pengendalian internal terdapat beberapa tahapan yaitu :
1. Merencanakan dan merancang pendekatan audit.
2. Melakukan pengujian pengendalian dan transaksi.
3. Melaksanakan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo.
4. Menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit.

2.2.3 Tujuan Pengendalian Internal

Menurut **Mardi (2011:57)** Tujuan pengendalian internal yang dirumuskan pada suatu perusahaan harus mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

1. Menjaga keamanan harta milik perusahaan

2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran informasi akuntansi
3. Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan
4. Membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan

Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya syarat tertentu yang digunakan sebagai unsur pendukung. Adapun unsur pokok sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi, merupakan suatu kerangka pemisah tanggung jawab secara tegas berdasarkan fungsi dan tingkatan unit yang dibentuk. Prinsip dalam menyusun struktur organisasi, yaitu pemisahan antara setiap fungsi yang ada dan suatu fungsi jangan diberi tangung jawab penuhmelaksanakan semua tahapan kegiatan, hal ini bertujuan supaya tercipta mekanismesaling mengendalikan antarfungsi secara maksimal.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan dalam organisasi. Struktur organisasi harus dilengkapi dengan uraian tegas yang mengatur hak dan wewenang masing-masing tingkatan beserta seluruh jajarannya.
3. Pelaksanaan kerja secara sehat. Tata cara kerja secara sehat merupakan pelaksanaan yang di buat sedemikian rupa sehingga mendukung tercapainya tujuan pengendalian internal yang ditunjukkan dalam beberapa cara.
4. Pegawai Berkualitas. Salah satu unsur pokok penggerak organisasi ialah karyawan, karyawan harus berkualitas agar organisasi memiliki citra berkualitas.secara umum, kualitas karyawan ditentukan oleh 3 aspek, yaitu

pendidikan, pengalaman dan akhlak. Tidak hanya berkualitas, tetapi kesesuaian tanggung jawab dan pembagian tugas perlu diperhatikan. Pegawai yang berkualitas dapat ditentukan berdasarkan proses rekruitmen yang dilakukan kepada mereka, apakah berbasis professional atau berdasarkan *carity* (kedekatan teman).

Dilihat dari tujuan sistem pengendalian internal, maka kita dapat menggolongkan sistem pengendalian internal tersebut menjadi dua macam yaitu :

1. Pengendalian internal akuntansi

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:222) Pengendalian internal akuntansi, meliputi rencana organisasi serta prosedur dan catatan yang relevan dengan pengamanan aktiva, yang disusun untuk meyakinkan bahwa :
a. Transaksi dilaksanakan sesuai dengan persetujuan pimpinan .
b. Transaksi dicatat sehingga dapat dibuat ikhtisar keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku serta menekankan pertanggung jawaban atas harta perusahaan.
c. Penguasaan atas aktiva diberikan hanya dengan persetujuan dan otorisasi pimpinan.
d. Jumlah aktiva dalam catatan dicocokan dengan aktiva yang ada pada waktu tepat dan tindakan yang sewajarnya jika terjadi perbedaan.

2. Pengendalian internal administratif

Menurut **Mulyadi (2013:102)** Pengertian Pengendalian internal administratif meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinnya kebijakan manajemen.